

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku- Buku

- Ali. Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*: Vol 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta.
- Anisitus. Amanat, 1995, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akte Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Akbarona. Danang Aziz, Ardli Nuryadi, Eko Setio Budi, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Algra, N.E., Van Duyvendijk, Mr. K, Simorangkir, J.C.T, Soetan Batoeah, H. Boerhanoeddin, 1983, *Mula Hukum Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Binacipta, Jakarta.
- Ali. Chidir, 2014, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ali. Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Apeldoorn L.J. Van, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Asshiddiqie. Jimly, Fadlil Sumadi, Ahmad, Edi Subiyanto, Achmad, Triningsih, Anna, 2016, *Putusan Monumental: Menjawab Problematika Kenegaraan*, Setara Press, Malang.
- Atmadja. Arifin P. Soeria, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Baswir. Revrinsond, 2009, *Manivesto Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bryan A. Garner, David W. Schultz, Lance A. Cooper, Elizabeth C. Powell, 1999, *Black's Law Dictionary: Seventh Edition*, West Group, United States of America.

Black, H. Campbell, 1999, *Black 'Law Dictionary, Seventh Edition*, West Publishing Co., USA.

Chatamarrasjid. Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Friedman. W., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum: Hukum & Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Fuady. Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Atmadja. I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara : Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang.

\_\_\_\_\_, 2014, *Filsafat Hukum : Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Pers, Malang.

Palguna. I Dewa Gede, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Greogery V. Varallo, Daniel A. Dreisbach, 1996, *Fundamentals Of Corporate Governance: A Guide for Directors and Corporate Counsel*, United States of America.

Hartini. Rahayu, 2017, *BUMN Persero:Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Hartono. Sunarjati, 1982, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung.

Hartono. Soenaryati, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Abad Ke -20*, Alumni, Bandung.

HR. Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zulkarnaen. H, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Bandung.

- Ilmar. Aminudin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Indrati. Maria Farida S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Satu): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Isharyanto, 2016, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Cetakan Pertama, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Jerry Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaler. I Gusti Ketut, 1983, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, Bali Agung, Denpasar.
- Kaelan. H., 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kasryno. Faesal, Pasandaran, Effendi, Fagi, Achmad M., 2003, *Kearifan Lokal Subak dan Kerta Masa atau Pranata Mangsa*, Dalam Subak Dan Kerta Masa Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan, Yayasan Padi Indonesia, Jakarta.
- Khairandy. Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Latif. Yudi, 2015, *Negara Paripurna: Historisital, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.
- Lewis D. Solomon, Alan R. Palmiter, 1999, *Corporation: Examples & Explanations*, Aspen Law & Business, Third Edition, New York, USA.
- Lukman. Mediya, 2013, *Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju Korporasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Marzuki. Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo. Sudikno, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2001, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Mubyarto, 2003, *Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP UGM*, Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mohamed Ramady, 2018, *Saudi Aramco 2030*, Springer International Publishing, New York City, tersedia di <https://www.springer.com/gp/book/9783319677491>.

Nurdin. Andriani, 2012, *Kepailitan BUMN Perseroan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT Alumni, Bandung.

Panggabean. Hana, Tjitra, Hora, Murniati, Juliana, 2014, *Kearifan Lokal Keunggulan Global Cakrawala Baru Di Era Globalisasi : Berdasarkan 18 Tahun penelitian mendalam, mengupas keunggulan dan tantangan Indonesia dalam Konteks Global*, Gramedia, Jakarta.

PH. Soetrisno, 1981, *Sekelumit Tentang Sistem Ekonomi Pancasila Ditinjau Dari Segi Sosio-Kultural*, dalam *Ekonomi Pancasila*, BPFE, Yogyakarta.

Pramono. Nindyo, 2001, *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2006, *Bunga Rampai: Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta.

Prasetya. Rudhi, 1983, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University Press, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (Disertasi dengan ulasan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2001, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Prasetyo, 2013, *Penerapan Business Judgment Rule Dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Purbacaraka. Purnadi, dan Sukanto, Soerjono, 1979, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1979, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.

Rajagukguk. Erman, 2014, *Walaupun Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian Tetap Berwenang Memeriksa Korupsi di BUMN*, dalam *Pendulum Antinomi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rasjidi. H.Lili dan Rasjidi, Liza Sonia, 2012, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rido. R. Ali, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.

Riyanto. Bambang, 1981, *Perusahaan Negara Dalam Ekonomi Pancasila*, dalam *Ekonomi Pancasila*, BPFE, Yogyakarta.

Robert W. Hamilton, 1997, *Corporation: Black Letter Series*, West Group.

Hammar. Roberth Kurniawan Ruslak, 2017, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal: Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Calpulis, Yogyakarta.

Saidi. Muhammad Djafar, Eka Merdekawati Djafar, 2016, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sidharta. Bernard Arief, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis*, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta, Yogyakarta.

- Simanjuntak. Emmy Pangaribuan, 1994, *Perusahaan Kelompok: (Group Company/ Concern*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sjahdeini. Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Sjawie. Hasbullah F., 2017, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kecana, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono, Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto. Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekardono, 1979, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Pertama*, Dian Rakyat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Kedua*, Rajawali, Jakarta.
- Soemitro. Rochmat, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT Eresco, Bandung.
- Steven R Schuit, 2002, *Corporate Law and Practice of the Netherlands*, Kluwer Las International, Netherlands.
- Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Sumadi. I Wayan Suca, Dharma Suteja I Made, Putra Kusuma Yudha I Putu, 2015 *Upacara Pertanian dalam Sistem Subak Di Bali*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Sumardjono. Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan Edisi 2 (dua)*, Sofmedia, Jakarta.
- Sutawan. Nyoman, 2008, *Organisasi dan Manajemen Subak di Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.

- Suyanto. Bagong, 2003, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Komunisme di Era Masyarakat Post-Modernisme*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tjandra. Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.
- Tjager. Nyoman, Alijoyo, F.A., Djemat, H.R., Soembodo, B, 2003, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Than Cheng Han, 2009, *Water Woon On Company Law*, Sweet & Maxwell Asia, Singapore.
- Tumbuan. Fred B.G., 2017, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Utrecht, E., 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta.
- Wahyudi. Bambang Setyo, 2017, *Indonesia Mencegah Jilid II: Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi Oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Wahyuni. Erma, HS Tomo, Tangkilisan Hessel Nogi S., 2005, *Kebijakan Dan Manajemen Privatiasai BUMN/BUMD*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YAPI), Yogyakarta.
- Weruin. Urbanus Ura, 2014, *Manusia Kebudayaan dan Masyarakat: Konsep Dasar dan Relasi Dialogis antara Manusia, Kebudayaan, Alam, dalam Kerangka: Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Pustaka Mandiri, Tangerang.
- Widjaja. Man S. Sastra, 2005, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Alumni, Bandung.
- Wilamarta. Misahardi, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Winarno. Budi, 2013, *Etika Pembangunan*, Cetakan Pertama, CAPS (Center for Academic Publishing Service), Yogyakarta.
- Windia. Wayan, Wayan Alit Artha Wiguna, 2013, *Subak Warisan Budaya Dunia*, Udayana University Press, Denpasar.
- Windia Wayan, Wayan Sudiarta, Wayan Sri Astiti 2015, *Sistem Subak di Bali: Kajian Sosiologis*, Udaya University Press, Denpasar.



Usfunan. Johanes, 2002, *Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat*, Djamban, Jakarta.

Yani. Ahmad, Widjaja. Gunawan, 1999, *Perseroan Terbatas Seri Hukum Bisnis*, Grafindo Persada, Jakarta.

Y. Thohari Hajriyanto, Bondan Gunawan, Wiendu Nuryanto, Sujito, Edy Suandi Hamid, Tadjuddin Nur Effendi, Airlangga Hartarto, Moh Mahfud MD, Joko Widodo, M. Dawam Raharjo, 2012, *Sumbangan Pikiran KAGAMA untuk Kedaulatan Bangsa: Strategi Kebudayaan untuk Kedaulatan Bangsa*, Kagama, Yogyakarta.

### **Makalah dan Journal**

Arief Hidayat, “Ceramah Kunci Ketua Mahkamah Konstitusi”, *disampaikan pada Diskusi Konsep Ideal BUMN Dalam Prespektif Bisnis dan Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945*, Bertempat di Grand Inna Kuta, Provinsi Bali, Pada Hari Jumat 25 Agustus, Tahun 2017.

Agung Puger, “Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan”, *disampaikan dalam Sosialisasi dan Sharing Knowledge, Kejaksaan Negeri Gianyar*, Bertempat di Rumah Sakit Umum Sanjiwani, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Pada Hari Rabu 13 Desember, Tahun 2017.

Budiman Ginting, “Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi di Indonesia”, *Jurnal Equality*, Vol 12, No 2, Agustus Tahun 2007.

Darmabrata, Wahyono, Hertanto Ary Wahyudi, “Implementasi Good Corporate Governance, Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22, No. 6, Tahun 2003.

Dian Puji N. Simatupang, “Konflik Regulasi Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia: ill-Structured Problems dan Contrario”, *disampaikan dalam Seminar Menuju Best Practice dan Clean Practice Sinergi BUMN dan Swasta: Memahami Tindak Pidana Korporasi & Konflik Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan BUMN*, Bertempat di Ballroom Flores A, Level Lobby, Hotel Borobudur Jakarta, Pada Hari Kamis 16 November, Tahun 2017.



- Edi Suharto, 2006, *Makalah Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Indonesia* <http://www.policy.hu/suharto/naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdfInternasionalPolicyFellowshipIPF>.
- Edphawin Eddy Jetjirawat, 2017, *Corporate Governance Of Temasek Holdings Private Limited*, disampaikan pada Diskusi Konsep Ideal BUMN Dalam Prespektif Bisnis dan Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945, Bertempat di Grand Inna Kuta Bali, Pada hari Jumat 25 Agustus 2017.
- Etty Herawati, “Aspek Hukum Pemisahan Keuangan Negara Pada BUMN”, *Makalah disampaikan dalam Seminar Menuju Best Practice dan Clean Practice Sinergi BUMN dan Swasta*, Bertempat di Ballroom Flores A, Level Lobby, Hotel Borobudur Jakarta, Pada Hari Kamis, 16 November, Tahun 2017.
- Firmanzah, “Optimalisasi Peran BUMN dalam Transformasi Lingkungan Bisnis”, *dalam Diskusi Rapat Umum Anggota Gala Dinner Forum Hukum BUMN: Konsep Ideal BUMN Dalam Perspektif Bisnis dan Ketatanegaraan Berdasarkan UUD NRI 1945*, Bertempat di Grand Inna Kuta, Provinsi Bali, Pada Hari Jumat 25 Agustus, Tahun 2017.
- I Nyoman Suarka, “Dasar dan Sastra Filosofi Kerta Masa dan Masa Kreta dalam Pertanian di Bali”, *dalam Makalah Sarasehan Pesta kesenian Bali Ke 36 Tahun 2014*, Bertempat di Taman Budaya Art Centre Kota Denpasar Denpasar, Provinsi Bali, Pada hari Kamis 3 Tanggal Juli, Tahun 2014.
- I Putu Gelgel, 2014 “Sinergi Undang-Undang Pokok Agraria Dan Kearifan Lokal Untuk Penguatan Subak Di Bali”, *dalam Makalah Sarasehan Pesta kesenian Bali Ke 36 Tahun 2014*, Bertempat di Taman Budaya Art Centre Kota Denpasar Denpasar, Provinsi Bali, Pada hari Kamis 3 Tanggal Juli, Tahun 2014.
- Majalah Kamar Dagang dan Insutrin (Kadin) Indonesia, 2017, *Jurus Pamungkas Debirokratisasi Investasi*, Kadin Indonesia, Jakarta.
- Nindyo Pramono, “Tinjauan Good Corporate Governance Dari Perspektif Akademis”, *Diskusi Panel*, Bertempat di Sheraton Mustika Hotel, Yogyakarta, Pada Tanggal 16 Desember, Tahun 2002.

Nindyo Pramono, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No 19 Tahun*

*2003 tentang BUMN, Dalam Permasalahan Seputar Hukum Bisnis:*

Persembahkan Kepada Sang Maha Guru, Gitama Jaya, Jakarta, Tahun 2007.

Nindyo Pramono, “Pokok-Pokok Pikiran Pribadi Atas RUU Persekutuan, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer”, *Diskusi Panel*, Bertempat di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Pada Tanggal 20-21 Februari, Tahun 1995.

Nyoman Utama, “Subak Jatiluwih Setelah Dua Tahun Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Dunia”, *dalam Makalah Sarasehan Pesta kesenian Bali Ke 36 Tahun 2014*, Bertempat di Taman Budaya Art Centre Kota Denpasar Denpasar, Provinsi Bali, Pada hari Kamis 3 Tanggal Juli, Tahun 2014.

Pahala Nugraha Mansury, “Hambatan dalam Kerja Sama BUMN dengan Swasta terkait Konflik Regulasi Pengelolaan Keuangan Negara”, *Disampaikan dalam Seminar Menuju Best Practice dan Clean Practice Sinergi BUMN dan Swasta: Memahami Tindak Pidana Korporasi&Konflik Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan BUMN*, Bertempat di Ballroom Flores A, Level Lobby, Hotel Borobudur Jakarta, Pada Hari Kamis 16 November, Tahun 2017.

Sri- Edi Suwasono, ”Pancasila, Doktrin Kebangsaan Dan Doktrin Karakyatan: Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” *Dalam Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, bertempat di Yogyakarta Tanggal 31 Mei sampai 01 Juni, Tahun 2012.

Wayan Windia, “Menghilangnya Tradisi Kertamasa dan Dampak Sistemik Terhadap Subak”, *dalam Makalah Sarasehan Pesta kesenian Bali Ke 36 Tahun 2014*, Bertempat di Taman Budaya Art Centre Kota Denpasar Denpasar, Provinsi Bali, Pada hari Kamis 3 Tanggal Juli, Tahun 2014.

Undang Mugopal, ”Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi”, *disampaikan dalam Seminar Menuju Best Practice dan Clean Practice Sinergi BUMN dan Swasta: Memahami Tindak Pidana Korporasi&Konflik Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan BUMN*, Bertempat di Ballroom Flores A, Level Lobby, Hotel Borobudur Jakarta, Pada Hari Kamis 16 November, Tahun 2017.

## Internet

Agustina Melani, "Intip 16 Pegadaian Swasta yang Terdaftar di OJK", *Liputan 6*, <http://bisnis.liputan6.com/read/3245525/intip-16-pegadaian-swasta-yang-terdaftar-di-ojk>.

Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi Bali, "Esensi Harifiah Makna Kertamasa Dalam Branding PKB 2014 Tema Kertamasa", available at <http://www.dishub.baliprov.go.id/id/>, ESENSI-HARPIAH-MAKNA-KERTAMASA.

Dutch Civil Code, Book 2 Legal Persons article 1 point 1-2, tersedia di, <http://www.dutchcivilcodebook.htm>.

*Netherland Burgerlijk Wetboek* (NBW) article 2:24b, tersedia di <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook022.htm>.

Eko Wicaksono, "Pembentukan Holding BUMN Digugat", *Liputan6*, <http://m.liputan6.com/bisnis/read/3215484/pembentukan-holding-bumn-pertambangan-digugat>.

Ilyas Istianur Praditya, "Pegadaian Raup Laba Rp. 1 Triliun di Semester I 2016", *Liputan6*, <http://bisnis.liputan6.com/read/2563657/pegadaian-raup-laba-rp-1-triliun-di-semester-i-2016>.

Indah Mutiara Kami, "Mega: BUMN untuk Kemakmuran Rakyat, Saat ini Seperti Korporasi Swasta", *news.detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d-3114688/mega-bumn-untuk-kemakmuran-rakyat-saat-ini-seperti-korporasi-swasta>.

Nindyo Pramono, "Beauty Contest Sebagai Business Judgement Versus Persaingan Usaha Tidak Sehat", *hukum online*, <http://www.hukumonline.com>.

Perkembangan Jumlah BUMN, available at <http://bumn.go.id/> 2014/12.

Perkembangan Jumlah BUMN, tersedia di <http://bumn.go.id/> 2017/01.

Ringkang Gumiwang, "Seberapa Buruk Kondisi Keuangan PLN", *Tirto.id*, <https://tirto.id/seberapa-buruk-kondisi-keuangan-pln-cxDC>.

Sri Wiyanti, "Surat Menkeu Bocor, Jonan Pastikan Keuangan PLN Terkendali", *agolf.xyz*, <http://agolf.xyz/surat-menkeu-bocor-jonan-pastikan-keuangan-pln-terkendali/>.

State-owned-enterprise-wikipedia, the free encyclopedia, available at: <https://en.m.wikipedia.org/>.

Tim Viva, *Pertamina Keluhkan Harga Elpiji 3 Kg Belum Pernah Naik*, *viva.co.id*, <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/582592-pertamina-keluhkan-harga-elpiji-3-kg-belum-pernah-naik>.

Watchdoc Image, "Bumi CiptaGelar-Ekspedisi Indonesia Biru", *Youtube*, <https://www.youtube.com/watch?v=H7uEJKnhamA>.

Wikipedia, "Garuda Indonesia, Sejarah Garuda Indonesia", [https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia).

## Disertasi

Achiran Pandu Djajanto, 2015, *Peranan Hukum Dalam Holdingisasi Dalam Rangka Memperkuat Aset Perusahaan BUMN Sebagai Kekayaan Negara Yang Dipisahkan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Agung Wicaksono, 2009, *Corporate Governance Of State-Owned Enterprises: Investment Holding Structure Of Government-Linked Companies In Singapore And Malaysia And Applicability For Indonesian State-Owned Enterprises*, DISSERTATION of the University of St. Gallen, Tersedia di [https://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/3488/\\$FILE/dis3488.pdf](https://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/3488/$FILE/dis3488.pdf).

Andriani Nurdin, 2009, *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara BUMN Berbentuk Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Kusnadi, 2015, *Kedudukan Kekayaan BUMN Persero Berdasarkan Undang-Undang Terkait Keuangan Negara Dalam Rangka Menciptakan Kemandirian Dan Pengembangan BUMN Persero Dilihat Dari Perspektif Keuangan dan Kerugian Negara*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Made Subha Karma Resen, 2015, *Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Good Governance dan Good Corporate Governance (Tinjauan*

Yuridis Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Entitas Bisnis)  
Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Prasetio, 2013, *Penerapan Business Judgment Rule* Dalam Restrukturisasi Transaksi Komersial PT (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

*Indische Bedrijventwet* (IBW) dan *Indische Comptabiliteitswet* (ICW).

Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989).

Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226). Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan



Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/ 2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77 /PUU-IX /2011, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 PRP Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 209).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 236).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2070).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Tertentu Kepada Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2551).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3246).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2983). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 74).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 14).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 21).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 14).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perum Perhutani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 105).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional PN PERTAMINA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 44).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara Perum Perhutani menjadi Perusahaan Perseroan Persero (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada

Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1732.K/10/NEM/2013 tentang Penugasan PT. Pertamina Persero dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana *Liquified Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun 2013.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 8085 K/12/NEM/2016 tentang penugasan Kepada PT Pertamina Persero untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung

Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07 P/HUM/2001 tentang Uji Materiil terhadap PP Nomor: 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perum Perhutani menjadi Persero terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 21P/HUM/2017 tentang Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik negara dan Perseroan Terbatas Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 tentang Permohonan Kasasi Pemeriksaan Perkara Perdata (Kepailitan) PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 191 K/Pdt. Sus/2011 tentang Pemeriksaan Perkara Perdata khusus (Kepailitan) pada tingkat kasasi terhadap PT Djakarta Llyod (Persero).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 397/Pdt.Sus/2009 tentang Perkara Perdata Khusus (Kepailitan) PT Iglas (Persero).